Available online at : http://jekpi.ebunand.ac.id

Jurnal Ekonomi Keuangan & Perencanaan Indonesia

ISSN (Print): XXXX-XXXX | ISSN (Online): XXXX-XXXX

Click here and write your Article Category

MODEL PERENCANAAN TENAGA KERJA BERDASARKAN KLASIFIKASI SEKTOR DI PROPINSI RIAU

Sri Maryanti

Fakultas Ekonomi,Universitas Lancang, Pekanbaru, Indonesia

INFORMASI

Received: 1 Desember 2020
Accepted: 27 Desember 2020
Published: Januari 2021

KATA KUNCI

Sektor Basis, Sektor Non Basis, Perencanaan Tenaga Kerja Terdidik, Tingkat Pengangguran, Perencanaan Tenaga Kerja

KORESPONDENSI

E-mail: sri_maryanti@unilak.ac.id

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan menganalisis perencanaan tenaga kerja terdidik pada sektor basis dan non basis di pronvinsi Riau. Berdasarkan data BPS mengungkapkan bahwa jumlah pengangguran tenaga kerja terdidik di Indonesia tahun 2020 sebesar 79,5% dari tingkat pendidikan SMA sederajat dan 20,4% dari lulusan perguruan tinggi. Jika dilihat dari data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2020 sebesar 7,07 persen atau 138,22 juta angkatan kerja, berarti ada sekitar 9,77 juta penduduk di Indonesia termasuk kategori pengangguran terbuka dengan TPAK yang mengalami kenaikkan sebesar 0,24 persen atau 67,77 persen yang artinya terjadi penurunan dalam jumlah penduduk yang bekerja. Digunakan Location Quotient(LQ) dan Shift Share (SS) dan Shift Share serta kefisien korelasi untuk mengetahui daya serap tenaga kerja per sector lapangan. Sektor yang prospek untuk dikembangkan bahwa selama tahun 2017-2020 di Propinsi Riau yaitu pertanian, pertambangan dan industri pengolahan. Sektor lapangan usaha yang tidak dapat bertumbuh cepat di Riau yaitu sektor pertambangan dan galian di tahun 2017-2020, untuk sektor pengadaan listrik dan gas di tahun 2017 namun di tahun 2018-2020 sektor ini dapat bertumbuh lebih cepat. Dari 17 sektor lapangan usaha menunjukkan 7 sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan ekonomi negative untuk beberapa tahuan sedangkan 10 sektor lainnya menunjukkan pertumbuhan yang positif. Sektor basis dalam penelitian ini adalah pertanian, pertambangan dan industri pengolahan tidak memiliki korelasi terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja di Propinsi Riau dengan nilai koefisien korelasi nol artinya tidak ada hubungan antara jumlah PDRB di Riau terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap per sektor lapangan usaha.

JEL Classification: J24, O15, O47

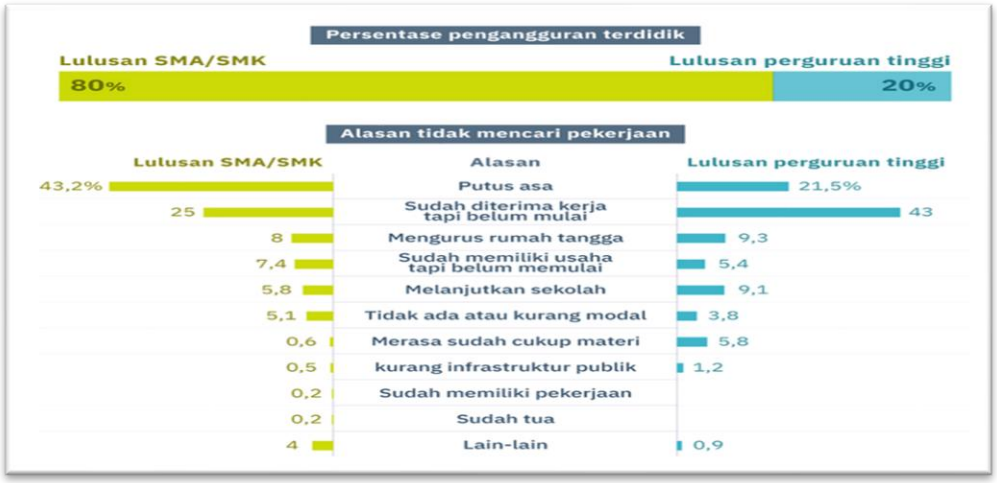
PENDAHULUAN

Dampak dari terjadinya excess supply tenaga kerja akan menimbulkan pengangguran, menurut (Bloom & Freeman, 1986) tingginya penawaran tenaga kerja karena jumlah penduduk yang terus mengalami pertambahan sehingga pasokkan sehingga penduduk yang masih dalam usia kerja maupun tidak akan semakin meningkat. Tingkat pengangguran menjadi point penting dalam hal ini paling utama untuk karena berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan para pengangguran dan ini menjadi tanda bahwa ekonomi tidak menggunakan beberapa sumberdaya secara efisien karena banyak pekerja yang ingin bekerja tapi tidak mendapatkan pekerjaan.

Berdasarkan data yang di publikasikan BPS bahwa jumlah penduduk bekerja tahun 2021 di Indonesia cenderung meningkat dari tahun sebelumnya yaitu dari 92,93% meningkat menjadi 93,74%, sedangkan jumlah pengangguran cenderung menurun dari tahun sebelumnya yaitu dari 7,07% turun menjadi 6,26% di tahun 2021. Namun yang menjadi fenomenya adalah apakah persentase penduduk bekerja tersebut didominasi oleh tenaga kerja terdidik? atau berapakah daya serap pasar kerja untuk pekerja terdidik? apakah semua sektor lapangan usaha mampu menyerap tenaga kerja teridiidik di Indonesia? berapa lama durasi menganggur dari tenaga kerja terdidik?. Oleh karena itu pentingnya perencanaan tenaga kerja bagi tenaga kerja terdidik sehingga durasi menganggurnya tidak terlalu lama disamping perlu adanya perencanaan tenaga kerja agar ada pemerataan penyerapan tenaga kerja untuk semua sektor lapangan usaha bagi tenaga kerja terdidik.

Keberhasilan sebuah negara salah satunya dilihat dari tingkat pendidikan dari penduduknya. Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini sangat beralasan karena dalam teori human capital dikatakan produktivitas dapat meningkat jika seseorang memiliki pendidikan tinggi dan produktivitas yang dihasilkan tersebut berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi juga, namun ini tidak terlepas dari lamanya waktu sekolah dan memperoleh pekerjaan (Nugroho, 2014). Namun yang terjadi semakin sempitnya lapangan pekerjaan dan semakin banyaknya jumlah pencari kerja menyebabkan durasi menganggur dari tenaga kerja terdidik menjadi lebih lama.

Idealnya peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan jangan sampai menjadi ancaman bagi Indonesia. Untuk menanggulangi hal ini pemerintah Indonesia berupaya untuk memanfaatkan SDM yang melimpah menjadi produk potensia bagi pembangunan nasional sehingga lulusan yang dihasilkan siap menghadapi tantangan pada era Bonus Demografi 2020-2030 (Maryati, 2015). Para pencari kerja dengan berbagai tingkat pendidikan termasuk dalam kategori pengangguran (Sarjana et al., 2017) tetapi justru yang banyak ditemui adalah banyaknya jumlah pengangguran terdidik saat ini di Indonesia yaitu berjumlah 79,5% dari lulusan SMA/SMK dan 20,4% dari lulusan perguruan tinggi hal ini terjadi karena durasi menganggur yang terlalu lama sehingga membuat para pencari kerja menjadi putus asa seperti yang dirilis dari data sakernas yang dipublikasikan oleh lokadata dan Tempo.

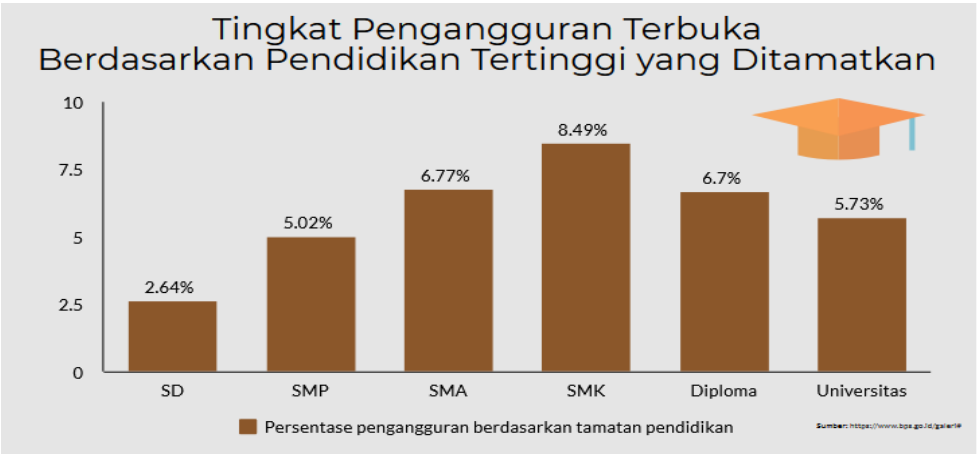


Gambar 1: Persentase Pengangguran Terdidik di Indonesia Tahun 2020

Sumber: Sakernas 2019 dan lokadata

Durasi menganggur tidak terlepas dari keterkaitan antara dunia sekolah/PT dan dunia kerja tidak terlepas dari apa yang diperoleh ketika menempuh pendidikan. Dalam menempuh pendidikan setidaknya harus ada link dan macth antara tujuan, input, proses, output dan out comenya antara pendidikan dengan dunia kerja karena kualitas dan relevansi serta kompetensi lulusan sangat berkaitan erat dengan kemampuan para lulusan untuk berkompetisi dalam dunia kerja (Muhson et al., 2012).

Laju pertumbuhan penduduk yang bekerja per sektor lapangan usaha dari tahun 2017-2020 sebesar 6,14% . Sedangkan laju pertumbuhan penduduk bekerja per sektor lapangan usaha tiap tahunnya cenderung menurun dari 4,35% menjadi -0,23% artinya jumlah penduduk yang bekerja persektor lapangan usaha cendrung menurun karena tidak tercapainya posisi ekulibirum antara pencari kerja per sektor lapangan usaha dengan lapangan kerja per sektor lapangan usaha tersebut. Tahun 2020 ada 138,22 juta angkatan kerja (7,07%) yang termasuk dalam tingkat pengangguran terbuka (TPT) berarti ada sekitar 9,77 juta penduduk di Indonesia termasuk kategori pengangguran terbuka dengan TPAK yang mengalami kenaikkan menjadi 67,77 persen yang artinya jumlah penduduka yang bekerja mengalami penurunan. Dari tingkat pendidikan yang ditamatkan tingkat penangguran terbuka terlihat dari grafik berikut ini:



Gambar 2: Persentase Penganguran Dari Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2020

Sumber: Sakernas 2020 dan Tempo

Di Provinsi Riau jumlah pengangguran tahun 2017-2020 menunjukkan 6,22% atau 184,56 ribu jiwa, untuk tahun 2018 jumlah pengangguran berasal dari penduduk yang memiliki latar belakang pendidikan SMA yaitu 37,93%, SMK 18,32%, Sarjana 11,11%, SMP 14,72%. Tahun 2019 jumlah pengangguran di Riau 5,97% atau sekitar 190,14 ribu jiwa. Tahun 2020 jumlah pengangguran di Riau 6,32% dan jumlah penduduk yang bekerja tidak merata untuk setiap sektor lapangan usaha yang ada. Ketidakmerataan daya serap tenaga kerja untuk tiap sektornya disebabkan oleh beberapa hal seperti keterbatasan daya serap sektor perekonomian dan semakin tingginya jumlah pencari kerja. Maslah klasik yang muncul dari sisi ketenagakerjaan yaitu (1) tingkat pendidikan, dimana rendahnya kualitas calon tenaga kerja yang dihasilkan, (2) sulitnya calon tenaga kerja memperoleh keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja, (3) adanya system Outsourching yang diberlakukan oelh perusahaan, (4) banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), (5) penyebaran tenaga kerja yang tidak merata. Provinsi Riau merupakan provinsi yang termasuk wilyah yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi di bandingkan dari provinsi lainnya. Jika diperhatikan tidak jalannya link and match anatar lulusan yang dihasilkan dengan kebutuhan pasar kerja akan tenaga kerja.

Berdasarkan narasi diatas maka penelitian ini ingin mengkaji bagaimana perencanaan tenaga kerja terididik untuk sektor basis dan non basis di provinsi Riau, dimana dalam menganalisisnya juga menggunakan data Indonesia sebagai perbandingan?.

TINJAUAN TEORITIS

Adanya permintaan akan tenaga kerja, belum dapat menyerap jumlah tenaga kerja terdidik. Tingginya tingkat pengangguran terdidik disebabkan oleh lemahnya permintaan akan tenaga kerja dan rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja sehingga banyak pekerja yang bekerja tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan mereka (Assaad et al., 2020).

Menurut Blancard dan Johnson (2013) untuk menentukan apakah seseorang itu menganggur jauh lebih sulit karena harus memenuhi dua kondisi yaitu seseorang tidak punya pekerjaan serta tidak dalam proses unntuk mencari kerja. Berapa banyak jumlah orang yang memiliki pekerjaan disebut lapangan kerja, jika seseorang tidak mempunyai pekerjaan sama sekali disebut pengangguran, penggabungan antara orang bekerja dengan yang menganggur disebut angkatan kerja.

Tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik merupakan bagian termasuk dalam kategori tenaga kerja. Dalam artikel ini yang menjadi fokus utamanya adalah tenaga kerja terdidik karena selama ini pendidikan dianggap mampu memperbaiki bahkan mampu memperbaiki kualitas diri manusia, namun kenyataannya sangat berbeda dimana jumlah pengangguran didominasi oleh orang yang mengenyam pendidikan, dimana mereka yang ahli dibidangnya dan memiliki latar belakang pendidikan tinggi disebut dengan tenaga kerja terdidik (Arrozi & Sutrisna, 2018).

Setiap masyarakat yang melakukan permintaan terhadap barang dan jasa akan berdampak terhadap demand labor di perusahaan tersebut untuk dapat memproduksi barang dan jasa, jadi semakin banyak barang dan jasa dibuthkan masyakarat maka semakin banyak juga demand labor di perusahaan tersebut (Simanjuntak,2001).

Dalam penyerapan tenaga kerja setiap perusahaan membedakanya berdasarkan keahlian dan

tingkat pendidikan dari tenaga kerja. Menurut (Sukirno ,2012) para pekerja yang tidak memiliki pendidikan dan keterampilan disebut tenaga kerja kasar, tenaga kerja terampil ini memperoleh keahlian serta keterampilannya dari pelatihan yang pernah diikuti dan tenaga kerja terdidik yang memiliki kepakaran pada bidang tertentu. Dengan adanya beberapa sektor lapangan usaha yang ada di Indonesia , pemerintah berharap setiap sektor lapangan usaha tersebut dapat menjadi sektor basis untuk penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukkan jumlah tenaga kerja pada beberapa sektor saja, sehingga ada pemerataan penyerapan tenaga kerja per sektor lapangan usaha.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Maryanti, 2015) bahwa pengangguran terjadi didominasi pada kelompok umur muda dan usia produktif. Sehingga hal ini menjadi perhatian bagi kita bersama, dimana letak permasalahannya. Apakah tenaga kerja yang ada tidak memiliki keahlian spesifik yang dibutuhkan oleh pasar kerja atau perusahaan tersebut yang tidak mampu untuk menambah tenaga kerja karena jumlah permintaan barang dan jasa dari masyarakat terus mengalami penurunan. Menurut kajian yang dilakukan oleh (A. Adi, 2016) minimnya kompetensi yang dimiliki lulusan dari tingkat sekolah maupun perguruan tinggi menyebabkan belum siapnya lulusan tersebut memasuki pasar kerja dan ini berkontribusi terhadap rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut Pitartono (2016) dalam (A. Adi, 2016) bahwa ada beberapa faktor penyebab tingginya tingkat pengangguran di Indonesia yaitu kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan, sempitnya lapangan pekerjaan dan paradigma yang menganggap sarjana tersebut harus bekerj bukan menciptakan lapangan pekerjaan.

Dari teori human capital disebutkan jika sesorang menambah pendidikannya (semakin banyaknya tenaga kerja terdidik) artinya kemampuan kerjanya dan kualitas akan meningkat sehingga dapat menurunkan pengangguran (Sumarsono,2009). Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan dalam buku (Kuncoro,2015) bahwa pendidikan dapat membentuk karakter, skill,yang mampu menciptakan kemandirian yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Menurut (Suaidah & Cahyono, 2013) menyebutkan bahwa jenjang pendidikan yang dilalui selam dua belas tahun adalah upaya pemerintah untuk memenuhi tuntutan dari pasar kerja. Karena syarat- syarat dalam dunia kerja mengharuskan si pelamar kerja memiliki pengetahuan dan kualitas sehingga dengan jenjang pendidikan yang dilalui tersebut dapat menjadikan tenaga kerja lebih berkualitas.

Ketika sarjana yang dihasilkan sebuah perguruan tinggi ingin bekerja, maka sektor mana sajakah yang menjadi unggulan bagi lulusan perguruan tinggi?. Untuk mengetahui hal ini tentu perlu dilakukan analisis per sektor usaha dan dapat disebut sebagai basis sebuah sektor juga non basis sektor. Menurut Tarigan (2003) lapangan usaha yang memiliki pangsa pasar lebih besar dibandingkan sector lainnya disebut sektor basis dan untuk mengetahuinya dapat menggunakan Location Quotient(LQ). Dalam kegiatan perekonomian menurut Sjafrijal (2008) fokus dari sektor basis adalah untuk melayani pasar di wilayah regional atau intraregional, sedangkan sektor non basis hanya terfokus pada wilayah regional saja. Hal ini sangat mendasar karena dalam pembangunan daerah diperlukan fihak ketiga untuk dapat membantu kegiatan perekonomian suatu negara atau wilayah. Oleh karena itu dalam kegiatannya sektor basis bersifat exogenous sebab semua saling berkaitan satu sama lainnya yaitu antara kondisi perekonomian internal wilayah yang mampu memberikan dampak

terhadap bertumbuhnya lapangan pekerjaan. Sedangkan untuk kegiatan sektor non basis lebih kepada upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Agar terjadi pemerataan daya serap tenaga kerja pada sektor lapangan usaha yang tersedia tentunya diperlukan perencanaan tenaga kerja karena dengan adanya perencanaan tenaga kerja yang dilakukan maka kita dapat mengetahui factor penyebab terjadinya ketidakseimbangan antara demand labor dan supply labor sehingga dibutuhkan informasi yang berkelanjutan terkait kebutuhan dan persedian tenaga kerja (Maryanti, 2012). Kondisi tenaga kerja disuatu negara sangat mempengaruhi kondisi perekonomian negara tersebut, karena setiap tenaga kerja harus memperoleh pekerjaan agar dapat meningkatkan keunggulan dan daya saingnya. Sehingga tidak seimbangnya lapangan kerja berdampak terhadap demand labor dan supply labor (Pramusinto & Mulyaningsih, 2019).

Perencanaan tenaga kerja dibutuhkan agar antara kebijakan yang diambil tidak tumpang tindih dengan kebutuhan, misalnya kebutuhan suatu negara adalah untuk meminimalisir angka pengangguran maka harus sudah di rencanakan konsep untuk menekan angka pengangguran tersebut. Perencanaan tenaga kerja menurut Hasibuan (2002) merupakan aktifitas dalam menyeimbangkan antara demand labor dan supply labor. Dalam membuat perencanaan tenaga kerja harus didasarkan kepada kepentingan individu, perusahaan, organisasi dan kepentingan nasional, karena semua ini saling berkaitan, sehingga missmanajemen dapat teratasi (Maryanti, 2016).

Untuk dapat mengatasi permasalahan ketenagakerjaan perlu pembenahan oleh pemerintah daerah provinsi Riau atau pemerintah Indonesia. Cina memiliki masalah dalam megatasi pengangguran oleh karena itu di negara Cina tersebut dibutuhkan kecepatan dan skala pendidikan yang harus di tingkatkan dengan membuka sekolah dengan jenis keragaman dan keahlian yang luas (Gao & Pan, 1996). Membangun atau membuat perencanaan tenaga kerja sangatlah penting terutama dinegara berkembang seperti di Indonesia agar setiap wilayah di Indonesia ini bisa memperkirakan pertumbuhan penduduk, pekerjaan bagi para pencari kerja dan pendidikan untuk masyarakatnya.

METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan analisa kuantitatif dan kualitatif yang didasarkan pada data tahun 2017-2020 dari BPS untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Analisa kuantitatif digunakan untuk mengetahui sektor lapangan usaha mana saja yang dapat berkembang dengan cepat dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian di wilayah tersebut serta untuk mengetahui korelasi antara sektor basis suatu wilayah terhadap daya serap tenaga kerja di wilayah tersebut.

A) Metode Location Quotient (LQ)

Membandingkan tenaga kerja per sector lapangan usaha di semua propinsi di Indonesia dengan tenaga kerja per sektor lapangan usaha di Indonesia dengan rumus:

$$LQ = \frac{\left(\frac{S_{ib}}{S_b}\right)}{\left(\frac{S_{ia}}{S_a}\right)}$$

Dimana :

Sib : Jumlah Pendapatan (Tenaga kerja) per sektor lapangan usaha di Propinsi di Indonesia

Sb : Jumlah Pendapatan (Tenaga kerja) total disemua sektor di Propinsi di Indonesia

Sia : Jumlah Pendapatan (Tenaga kerja) sektor i di Indonesia

Sa : Jumlah Pendapatan (Tenaga kerja) total disemua sektor di Indonesia

Menurut Bendavid-Val dalam (Setiawan et al., 2018)

1. LQ > 1 artinya pertumbuhan ekonomi pada sektor i > pertumbuhan ekonomi di sektor sejenis, hal ini berarti sektor tersebut (i) adalah sektor unggulan dan juga sektor basis dan sangat prospek untuk dikembangkan.
2. LQ < 1 artinya pertumbuhan ekonomi pada sektor tersebut (i) < dibandingkan dengan laju pertumbuhan pada sektor sejenis, hal ini berarti sektor tersebut bukan menjadi sektor unggulan dan bukan termasuk sektor basis dan tidak prosepek untuk dikembangkan.
3. LQ = 1 artinya pertumbuhan ekonomi pada sektor i tersebut sama dengan laju pertumbuhan sektor yang sama

Untuk menganalisis perencanaan tenaga kerja dapat dilakukan dengan mengetahui jumlah penyerapan tenaga kerja per sektor lapangan kerja yang dihubungkan dengan PDRB dengan menggunakan korelasi pearson Mulyanto dalam (Setiawan et al., 2018):

$$r = \frac{(n.\sum x) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\left(n.\sum x^2 - (\sum x)^2\right)}.\sqrt{n\sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

Keterangan:

r : Koefisien korelasi

n: banyaknya data

x: penyerapan tenaga kerja

y: PDRB sektor Basis

Dengan ketentuan:

1. Jika nilai koefisien korelasi = 0 maka terdapat korelasi yang lemah stau sama sekali tidak ada korelasinya
2. Jika nilai koefisien korelaisnya positif 1 maka ada hubungan yang sangat kuat dan positif
3. Jika nilai koefisien korelasinya negative 1 maka memiliki hubungan kuat dan negativ

B) Metode Shift Share (SS)

Metode ini digunakan untuk mengetahui peranan tiap sektor lapangan usaha dalam persekonomian nasional dengan mengambil data dari kegiatan ketenagakerjaan atau ekonomi suatu wilayah Putra dalam (L. Adi, 2017).

$$KPN = \left(\frac{Y_t}{Y_0} - 1\right)$$

$$KPP = \left(\frac{Y_{it}}{Y_{i0}} - \frac{Y_t}{Y_0}\right)$$

$$KPPW = \left(\frac{y_{it}}{y_{i0}} - \frac{Y_{it}}{Y_{i0}}\right)$$

Keterangan:

KPN = Komponen Pertumbuhan Nasional
KPP = Komponen pertumbuhan Proporsional
KPPW = Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah
Yt = Data Tahun tertentu
Y0 = Data tahun dasar

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Domestik Regional Bruto merupakan alat ukur untuk menentukan seberapa besar kemampuan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Nilai PDRB dalam penelitian ini adalah PDRB harga tetap untuk Indonesia dan Propinsi Riau. Digunakannya PDRB atas harga tetap adalah agar dapat diketahui kemajuan ekonomi suatu wilayah secara riil tanpa pengaruh harga.

Jika dilihat dari data PDRB perkembangan perekonomian di Riau menunjukkan angka yang semakin baik dari tahun ketahun. Sedangkan data PDRB di Indonesia secara keseluruhan menunjukkan peningkatan. Namun yang menjadi pertanyaan apakah dengan jumlah PDRB yang terus meningkat apakah dapat berdampak terhadap kondisi perekonomian yang semakin membaik?, hal ini tidak dapat dijadikan jaminan untuk mengatakan perekonomian suatau negara atau suatu daerah tersebut baik karena banyak indikator-indikator yang mempengaruhi kemakmuran suatu negara atau propinsi.

Tabel 1: PDRB Atas Harga Konstan Propinsi Riau dan Indonesia Tahun 2017-2020 (miliarRp)

Lapangan Usaha	PDRB RIAU				PDB Indonesia			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	119281,6	124587,86	129680	135314,9	1258375,7	1307373,9	1354957,3	697263,9
Pertambangan dan Penggalian	97348,95	92055,33	85625	80009,6	779678,4	796505	806206,2	394045,9
Industri Pengolahan	139717,1	144727,81	153154	156112,74	2103466,1	2193368,4	2276667,8	1096741
Pengadaan Listrik dan Gas	275,07	284,54	323,31	370,42	101551,3	107108,6	111436,7	53257,6
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	65,36	65,21	66,48	66,95	7985,3	8429,5	9004,9	4637,1
Konstruksi	38275,86	40367,57	42899	41491,53	987924,9	1048082,8	1108425	527083,6
Perdagangan, Hotel	43302,34	46040,86	48430	42612,29	1311746,5	1376882,9	1440263	687982,3

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor								
Transportasi dan Pergudangan	4070,19	4200,9	4240,9	3204,33	406679,4	435381,9	463157,5	191327,4
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2179,2	2279,91	2337,9	1821,17	298129,7	315068,6	333306,8	147172,6
Informasi dan Komunikasi	4094,53	4323,76	4725,7	5320,26	503420,7	538762,7	589536,1	317315,1
Jasa Keuangan dan Asuransi	4381	4584,21	4591,3	4781,73	398971,4	415620,6	443093,1	229037,7
Real Estat	4223,51	4375,21	4603,6	4693,13	289568,5	299648,2	316901,1	161443,9
Jasa Perusahaan	26,02	28,15	29,99	22,6	172763,8	187691,1	206936,2	97324,9
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	8282,84	8364,07	8597,3	8309,17	326514,3	349374,8	365533,8	178620
Jasa Pendidikan	2266,74	2376,27	2533,2	2586,22	304810,8	321132,2	341355,1	167299,4
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	872,9	921,48	1020	1182,52	109497,5	17325,6	127522,1	66345,2
Jasa Lainnya	2320,26	2521,48	2742,1	2124,83	170174,8	185431,6	205011,4	96840
PDRB	**470983,5**	**482064,63**	**495598**	**490024,47**	**9912928,1**	**10425397,3**	**10949037,8**	**5292967**

Sumber: BPS.go.id

Dalam data PDRB di setiap sektor yang disajikan ini bisa digolongkan kedalam sektor tertier, primer dan sekunder. Dikatakan sektor primer karena pada sektor ini mengambil secara langsung dari alam, sektor A. Pertanian dan B. Pertambangan tergolong dalam sektor primer. Untuk industri pengolahan, listrik dan gas juga pengadaaan air bersih serta

konstruksi termasuk kedalam sektor yang kedua yaitu sekunder, karena pada sektor ini membuat suatu produk yang berasal dari sektor utama (primer). Untuk bidang pelayanan dan jasa tergolong dalam sektor tertier.

Setiap sektor berkontribusi terhadap PDRB pada tahun 2017-2020 konstribusi terbesar adalah berasal dari sektor industri pengolahan yang kontribusinya terus meningkat dari tahun ke tahu yaitu mulai dari 29,66% di tahun 2017 meningkat menjadi 31,86% di tahun 2020. Untuk sektor primer memiliki kontribusi terbesar kedua setlah sektor industri pengolahan pada sektor sekunder yaitu mulai dari 25,33% tahun 2017 meningkat menjadi 27,61% tahun 2020 untuk sektor pertanian, sedangkan sektor pertambangan berkontribusi terhadap PDRB sebesar 20,67% tahun 2017 dan cenderung turun di tahun 2020 menjadi 16,33% tahun 2020.

Tabel 2: Distribusi Produk Domestik Bruto Provinsi Riau Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2020

Lapangan Usaha	**DISTRIBUSI PDRB (%) di RIAU**			
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,33	25,84	26,17	27,61
Pertambangan dan Penggalian	20,67	19,1	17,28	16,33
Industri Pengolahan	29,66	30,02	30,9	31,86
Pengadaan Listrik dan Gas	0,058	0,059	0,065	0,076
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,014	0,014	0,013	0,014
Konstruksi	8,127	8,374	8,656	8,467
Perdagangan, Hotel Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,194	9,551	9,772	8,696
Transportasi dan Pergudangan	0,864	0,871	0,856	0,654
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,463	0,473	0,472	0,372
Informasi dan Komunikasi	0,869	0,897	0,954	1,086
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,93	0,951	0,926	0,976
Real Estat	0,897	0,908	0,929	0,958
Jasa Perusahaan	0,006	0,006	0,006	0,005
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,759	1,735	1,735	1,696
Jasa Pendidikan	0,481	0,493	0,511	0,528
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,185	0,191	0,206	0,241
Jasa Lainnya	0,493	0,523	0,553	0,434
TOTAL	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Diolah Oleh Penulis

Untuk membangun suatu negara atau suatu wilayah diperlukan pembangunan di setiap sektor lapangan usaha. Namun yang harus menjadi perhatian adalah apakah sektor yang menjadi perhatian tersebut merupakan sektor unggulan di negara atau wilayah tersebut. Hal ini sangat mendasar karena adanya aktifitas pada sektor basis sangat mempengaruhi kondisi

perekonomian karena pada sektor basis akan mampu untuk menjual produk yang dihasilkan sedangkan untuk sektor non basis semua tergantung kepada sektor basis karena akan berdampak terhadap pola konsumsi dan investasi suatu negara atau daerah.

Perhitungan Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengelompokkan mana yang menjadi sektor basis dan mana yang menjadi sektor non basis. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mengambil perbandingan perhitungan LQ Propinsi Riau, hal ini didasarkan Propinsi Riau tergolong Propinsi yang paling makmur karena memiliki PDRB urutan kelima terbesar setelah Di Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau yang didasarkan atas PDRB tahun 2019. Dengan data PDRB ini maka penulis ingin mengetahui bagaimana dengan kondisi tenaga kerja yang ada di Riau. Bagaimana penyerapan tenaga kerja di Riau serta tingkat pengangguran yang ada Riau. Apakah dengan besarnya PDRB suatu propinsi berdampak terhadap kemakmuran masyarakat dengan di tunjukkan dengan semakin rendahnya tingkat pengangguran di daerah tersebut.

Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut penulis mencoba mengkaji didasarkan dari perhitungan Location Quotient (LQ) yang betujuan untuk mengetahui sejauhmanakah keunggulan dari tiap sector lapangan usaha di wilayah tersebut dan seberapa besar sektor tersebut dapat dikembangkan untuk kemajuan ekonomi wilayah tersebut. Dari hasil pengolahan data berdasarkan PDRB Indonesia dan Propinsi Riau dari tahun 2017 – 2020 menggunakan Location Quotient (LQ) diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3: Nilai Location Quotient (LQ) Riau Tahun 2017-2020

Lapangan Usaha	LQ RIAU				Rata-Rata	Keterangan
	2017	2018	2019	2020		
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,995	2,061	2,114	2,0962	2,0667	Basis
B. Pertambangan dan Penggalian	2,628	2,499	2,346	2,1932	2,4167	Basis
C. Industri Pengolahan	1,398	1,427	1,486	1,5375	1,4622	Basis
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,057	0,057	0,064	0,0751	0,0634	Non Basis
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,172	0,167	0,163	0,156	0,1647	Non Basis
F. Konstruksi	0,815	0,833	0,855	0,8503	0,8384	Non Basis
G. Perdagangan, Hotel Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,695	0,723	0,743	0,669	0,7075	Non Basis
H. Transportasi dan Pergudangan	0,211	0,209	0,202	0,1809	0,2006	Non Basis
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,154	0,156	0,155	0,1337	0,1497	Non Basis
J. Informasi dan Komunikasi	0,171	0,174	0,177	0,1811	0,1757	Non Basis
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,231	0,239	0,229	0,2255	0,231	Non Basis
L. Real Estat	0,307	0,316	0,321	0,314	0,3144	Non Basis
M,N. Jasa Perusahaan	0,003	0,003	0,003	0,0025	0,003	Non Basis

O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,534	0,518	0,52	0,5025	0,5184	Non Basis
P. Jasa Pendidikan	0,157	0,16	0,164	0,167	0,1619	Non Basis
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,168	1,15	0,177	0,1925	0,4218	Non Basis
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,287	0,294	0,295	0,237	0,2784	Non Basis

Sumber: Diolah Oleh Penulis

Untuk menjadi sektor unggulan dari suatu negara atau propinsi adalah (1). memiliki permintaan yang besar atas produk yang dihasilkan, karena semakin banyaknya jumlah permintaan akan suatu produk akan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut; (2) penggunaan teknologi yang dapat memperluas pengembangan kapasitas produksi; (3) fihak swasta dan pemerintah harus dapat meningkatkan investasi; (4) setiap sektor lapangan usaha harus dapat dikembangkan sehingga berdampak terhadap sektor lainnya yang belum dapat berkembang.

Dari 17 sektor lapangan usaha selama kurun waktu empat tahun dari 2017-2020 menunjukkan rata-rata sektor pertanian, pertambangan dan industri pengolahan yang ada di Riau memberikan dampak terhadap perekonomian di Riau. Dimana sektor pertambangan dan penggalian (sektor B) memiliki sumbangan tersebesar selama kurun waktu empat tahun terhadap perekonomian di Riau yaitu sebesar 2,42. Pada sektor pertanian menunjukkan rata-rata sebsar 2,07 serta untuk industri pengolahan sebesar 1,46. Tingginya nilai LQ pada sektor ini karena besarnya sumbangsih sektor ini terhadap perekonomian Riau. Dan ini juga terlihat tiap sektor lapangan usaha setiap tahunnya dengan nilai LQ > 1.

Dari nilai Location Quotient (LQ) > 1 bermakna bahwa selama tahun 2017-2020 sektor yang sangat prospek untuk bisa dikembangkan di Propinsi Riau yaitu pertanian, pertambangan dan industri pengolahan. Untuk tahun 2018 ada sedikit pengecualian bahwa sektor dimana nilai Location Quotient (LQ) > 1 pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial merupakan sektor basis sehingga sektor ini dapat dikembangkan tetapi di tahun 2017 dan 2019-2020 sektor ini tidak menjadi sektor basis karena PDRB pada sektor ini cenderung menunjukkan penurunan, hal ini disebabkan pemerintah daerah belum memfokuskan pengembangan pada sektor ini.

Sektor non basis untuk tahun 2017-2020 adalah selain dari sektor-sektor yang disebutkan dalam kategori sektor non basis yang terdiri dari 14 sektor karena nilai Location Quotient (LQ) < 1. Jadi pemerintah Propinsi Riau dapat mengembangkan tiga sektor lapangan usaha untuk bisa memajukan perekonomian di Riau, Upaya pemerintah Riau untuk dapat mengembangkan setiap sektor merupakan tantangan utama agar meminimalisir penumpukkan tenaga kerja kerja pada satu sektor lapangan usaha saja. Sektor yang belum menjadi sektor basis untuk masa datang diharapkan pemerintah dapat mencari solusi untuk mengembangkan 17 sektor tersebut sehingga sama-sama memiliki kontribusi terhdapa PDRB dan yang paling utama dapat menyerap tenaga kerja sehingga bisa menekan jumlah pengangguran yang ada di Riau.

Dengan adanya data PDRB Riau dan Indonesia maka kita dapat mengetahui kondisi ekonomi di Riau maupun di Indonesia melalui perhitungan yang menggunakan Shift Share (SS) sehingga para pejabat negara dapat mengambil kebijakan untuk memajukan sektor yang masih mengalami kemunduran dan terus mempertahankan sektor yang telah lebih dahulu unggul. Untuk menggunakan analisis Shift Share (SS) diperlukan beberapa indikator yaitu harus mengetahui sektor apa saja yang akan dianalisis, jika semua sektor yang akan dianalisis maka data yang harus dipersiapkan akan adalah data dari 17 sektor yang ada dalam PDRB atau data ketenagakerjaan untuk tiap sektornya. Lalu dapat dilakukan perhitungan dari tiap indikatornya dari kegiatan perekonomi diwilayah tersebut. Dari hasil pengolahan data yang menggunakan Shift Share (SS) ada perhitungan yang menggunakan Komponen Pertumbuhan Nasional (KPN) Riau selama kurun waktu 2017-2020 diperoleh 0,03 turun menjadi 0,02 dan meningkat kembali ditahun 2019 menjadi 0,03 dan turun menjadi -0,01 artinya terjadi perubahan produksi persektor lapangan usaha setiap tahunnya yang disebabkan oleh adanya perubahan produksi yang terjadi tiap sektor lapangan usahanya di daerah tersebut.

Nilai komponen pertumbuhan proporsional jika nilai KPP > 0 artinya sektor tersebut berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan wilayah tersebut lebih cepat jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Untuk wilayah Riau perkembangan tiap sektor lapangan usaha dari tahun 2017-2020 cukup beragam dimana sektor lapangan usaha yang tidak dapat bertumbuh cepat yaitu sektor pertambangan dan galian di tahun 2017-2020, untuk sektor pengadaan listrik dan gas di tahun 2017 namun di tahun 2018-2020 sektor ini dapat bertumbuh lebih cepat. Lalu tahun 2018-2019 sektor pengadaan air dan pengolahan sampah daur ulang tidak dapat bertumbuh dengan cepat tetapi di tahun 2017 dan tahun 2020 menunjukkan sektor ini dapat bertumbuh dengan cepat. Tahun 2020 untuk sektor konstruksi dan pengadaan hotel tidak dapat bertumbuh dengan cepat, begitu juga dengan sektor transposrtasi dan penyediaan akomodasi , makan dan minum di tahun 2019-2020 tidak mampu tumbuh lebih cepat. Sedangkan untuk sektor jasa keuangan dan asuransi di tahun 2019 dan 2019 tidak dapat bertumbuh dengan cepat. Untuk sektor administrasi pemerintahan, pertahan dan jaminan sosial selama 4 tahun itu tidak mampu bertumbuh dengan cepat. Sektor jasa lainnya hanya di tahun 2020 tidak mampu bertumbuh. Ketidakmampuan sektor-sektor tersebut bertumbuh disebabkan oleh tidak seimbangnya antara komposisi sektor dalam permintaan produksi akhir serta terdapatnya perbedaan didalam struktur dan keberagaman pasar.

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pertumbuhan ekonomi di Riau selama tahun 2017-2020 tiap sektor lapangan usahanya. Dari 17 sektor lapangan usaha menunjukkan 7 sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan ekonomi negative untuk beberapa tahuan sedangkan 10 sektor lainnya menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan ekonomi di Riau tahun 2017 tertinggi berada pada sektor jasa lainnya, lalu sektor jasa perusahaan. Untuk tahun 2018 pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yaitu 95,31%, tahun 2019 pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 9,17% dan di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 81,35%.

Jika dibandingkan dengan komponen nilai komponen pertumbuhan proporsional menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut tidak berperan begitu besar terhadap

pertumbuhan ekonomi di Riau selama kurun waktu 2017-2020, hal ini tentu menjadi kontradiktif artinya hubungan antara komponen pertumbuhan proporsional terhadap pertumbuhan ekonomi tidak selalu menunjukkan hasil yang positif, terjadinya perbedaan tersebut disebabkan di sektor yang memiliki pertumbuhan ekonominya tertinggi karena diimbangi oleh pertumbuhan di tahun-tahun beriktunya yang menunjukkan angka yang tidak begitu turun secara drastis.

Tabel 4 : Nilai *Shift Share (SS)* Propinsi Riau Tahun 2017-2020

Lapangan Usaha	KPN Riau				KPP Riau			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,03	0,02	0,03	-0,01	0,0263	0,021	0,0128	0,0547
Pertambangan dan Penggalian	0,03	0,02	0,03	-0,01	-0,09	-0,078	-0,098	-0,0543
Industri Pengolahan	0,03	0,02	0,03	-0,01	0,0276	0,0123	0,0301	0,0306
Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,02	0,03	-0,01	-0,016	0,0109	0,1082	0,157
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,03	0,02	0,03	-0,01	0,0208	-0,026	-0,009	0,0183
Konstruksi	0,03	0,02	0,03	-0,01	0,0326	0,0311	0,0346	-0,0216
Perdagangan, Hotel Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,03	0,02	0,03	-0,01	0,0371	0,0397	0,0238	-0,1089
Transportasi dan Pergudangan	0,03	0,02	0,03	-0,01	0,0199	0,0086	-0,019	-0,2332
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,03	0,02	0,03	-0,01	0,0174	0,0227	-0,003	-0,2098
Informasi dan Komunikasi	0,03	0,02	0,03	-0,01	0,0277	0,0325	0,0649	0,1371
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,03	0,02	0,03	-0,01	-0,049	0,0229	-0,027	0,0527
Real Estat	0,03	0,02	0,03	-0,01	0,0066	0,0124	0,0241	0,0307
Jasa Perusahaan	0,03	0,02	0,03	-0,01	0,0526	0,0583	0,0373	-0,2352
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,03	0,02	0,03	-0,01	-0,017	-0,014	-2E-04	-0,0223

Jasa Pendidikan	0,03	0,02	0,03	-0,01	0,0108	0,0248	0,0379	0,0322
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,03	0,02	0,03	-0,01	0,0316	0,0321	0,0788	0,1706
Jasa Lainnya	0,03	0,02	0,03	-0,01	0,0524	0,0632	0,0594	-0,2139

Sumber: Diolah Oleh Penulis

Tabel 5 : Nilai *Shift Share (SS)* Propinsi Riau dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017-2020

Lapangan Usaha	KPPW Riau				Pertumbuhan Ekonomi			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,01375	0,0055	0,00447	0,5289	0,0667	0,05	0,0453	0,5723
Pertambangan dan Penggalian	-0,0701	-0,076	-0,082	0,4457	-0,134	-0,13	-0,152	0,3801
Industri Pengolahan	0,01134	-0,0069	0,02024	0,5376	0,0656	0,029	0,0785	0,5569
Pengadaan Listrik dan Gas	-0,0051	-0,0203	0,09585	0,6678	0,0053	0,0141	0,2321	0,8135
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,0015	-0,0579	-0,0488	0,4921	0,0489	-0,06	-0,029	0,4992
Konstruksi	-0,0088	-0,0062	0,00513	0,4917	0,0504	0,0484	0,0678	0,4589
Perdagangan, Hotel Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,01911	0,0136	0,00586	0,4022	0,0828	0,0768	0,0578	0,2821
Transportasi dan Pergudangan	-0,0384	-0,0385	-0,0543	0,3425	0,0081	-0,006	-0,045	0,0981
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,0101	-0,0106	-0,0325	0,3374	0,0339	0,0356	-0,007	0,1164
Informasi dan Komunikasi	-0,042	-0,0142	-0,0013	0,5876	0,0123	0,0418	0,0917	0,7134

Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,0771	0,0047	-0,0645	0,5246	-0,099	0,051	-0,063	0,566
Real Estat	-0,0028	0,0011	-0,0054	0,51	0,0304	0,037	0,0468	0,5294
Jasa Perusahaan	-0,0052	-0,0045	-0,0372	0,2833	0,0741	0,0773	0,0282	0,0369
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-0,0108	-0,0602	-0,0184	0,4778	-0,001	-0,05	0,0095	0,4443
Jasa Pendidikan	0,00028	-0,0052	0,00305	0,5308	0,0377	0,0431	0,0691	0,5518
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,0102	0,8974	-6,2534	0,6391	0,048	0,9531	-6,146	0,7984
Jasa Lainnya	-0,0083	-0,0029	-0,0181	0,3025	0,0708	0,0838	0,0694	0,0774

Sumber: Diolah Oleh Penulis

Komponen pertumbuhan proporsional per sektor lapangan usaha di Indonesia menunjukan bahwa sektor yang berperan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia tahun 2017 yaitu sektor kontruksi, transportasi,penyediaan akomodasi, informasi , jasa keuangan dan jasa perusahaan. Untuk tahun 2018 sektor yang memberikan peran terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia adalah sektor pengadaan listrik, sektor pengdaan air, konstruksi,transportasi,penyediaan akomodasi,informasi dan komunikasi,jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan dan jasa lainnya. Sedangkan untuk tahun 2019 ada 11 sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tahun 2020 ada 9 sektor yang berkontribusi terhadap pertubuhan ekonomi nasional. Jika diperhatikan data KPP Indonesia tahun 2019 terlihat untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial memiliki nilai sebesear 6,31 hal ini berarti peran sektor ini di tahun 2019 sangat tinggi terhadap perekonomian Indonesia.

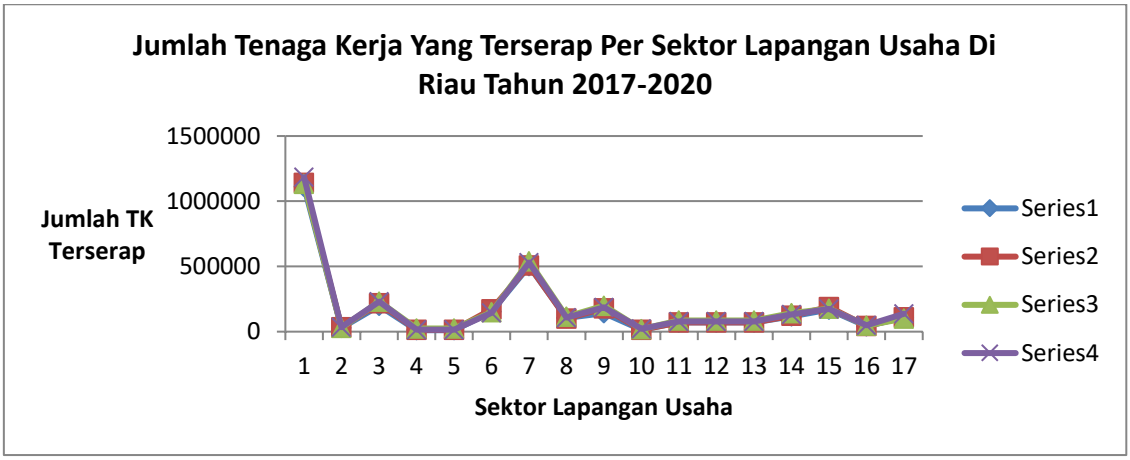
Tabel 6 : Nilai Komponen Pertumbuhan Nasional dan Nilai Komponen Pertumbuhan Proporsional Indonesia Tahun 2017-2020

Lapangan Usaha	KPN Indonesia				KPP Indonesia			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,0507	0,0517	0,0502	-0,517	-0,012	-0,013	-0,014	0,03118
Pertambangan dan Penggalian	0,0507	0,0517	0,0502	-0,517	-0,044	-0,03	-0,038	0,00535

Industri Pengolahan	0,0507	0,0517	0,0502	-0,517	-0,008	-0,009	-0,012	-0,0017
Pengadaan Listrik dan Gas	0,0507	0,0517	0,0502	-0,517	-0,035	0,003	-0,01	-0,0055
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,0507	0,0517	0,0502	-0,517	-0,005	0,004	0,018	0,03153
Konstruksi	0,0507	0,0517	0,0502	-0,517	0,0173	0,009	0,0073	-0,0079
Perdagangan, Hotel Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,0507	0,0517	0,0502	-0,517	-0,006	-0,002	-0,004	-0,0057
Transportasi dan Pergudangan	0,0507	0,0517	0,0502	-0,517	0,0342	0,019	0,0136	-0,0703
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,0507	0,0517	0,0502	-0,517	0,0034	0,005	0,0077	-0,0419
Informasi dan Komunikasi	0,0507	0,0517	0,0502	-0,517	0,0456	0,019	0,044	0,05483
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,0507	0,0517	0,0502	-0,517	0,004	-0,01	0,0159	0,03349
Real Estat	0,0507	0,0517	0,0502	-0,517	-0,015	-0,017	0,0073	0,02603
Jasa Perusahaan	0,0507	0,0517	0,0502	-0,517	0,0337	0,035	0,0523	-0,0131
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,0507	0,0517	0,0502	-0,517	-0,03	0,018	-0,004	0,00524
Jasa Pendidikan	0,0507	0,0517	0,0502	-0,517	-0,014	0,002	0,0127	0,00669
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,0507	0,0517	0,0502	-0,517	0,0177	-0,893	6,3101	0,03685
Jasa Lainnya	0,0507	0,0517	0,0502	-0,517	0,0366	0,038	0,0554	-0,0111

Sumber: Diolah Oleh Penulis

Dampak perhitungan analisis Shift Share (SS) dan Location Quotient (LQ) berdampak terhadap daya serap tenaga kerja tiap sektornya. Dari data tersebut dapat kita lihat apakah jika sektor lapangan usaha tersebut termasuk dalam sektor basis dan memiliki peran yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi maka dapat dikatakan sektor tersebut dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak? atau justru sebaliknya. Untuk menajwab semua pertanyaan tersebut maka dalam artikel ini disajikan data terkait daya serap per sektor lapangan usaha menggunakan korelasi



Gambar 3: Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap Per Sektor Lapangan Usaha Tahun 2017-2020 Di Provinsi Riau

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa trend sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja cenderung berubah untuk tiap tahun, terlihat grafik yang menunjukkan peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap selama tahun 2017-2020. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor pertanian selama 4 tahun dari 1.112.332 orang meningkat menjadi 1.184.203 orang. Lalu trend peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap di berada pada sektor perdagangan meningkat dari 503.3307 orang tahun 2017 menjadi 529.129 orang dan ini juga terjadi pada sektor penyediaan akomodasi yaitu dari 142.723 orang tahun 2017 meningkat menjadi 187.466 orang dan jasa pendidikan yaitu berjumlah 170.305 orang tahun 2017 meningkat menjadi 174.693 orang.

Dengan trend yang digambarkan dari grafik diatas dapat dilihat bawha tidak semua sektor yang merupakan sektor basis dapat menyerap jumlah tenaga kerja dalam jumlah yang besar, dari hasil perhitungan LQ yang dilakukan ada 3 sektor yaitu sektor pertanian, pertambangan dan industri pengolahan yang ada di Riau yang merupakan sektor basis akan tetapi hanya sektor pertanian saja yang yang menunjukkan trend penyerapan jumlah tenaga kerja yang cukup tinggi. Sedangkan sektor perdagangan, penyediaan akomodasi dan jasa pendidikan merupakan sektor non basis namun justru dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan sektor non basis lainnya. Artinya sektor basis memiliki prospek untuk dikembangkan namun belum mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak sementara sektor non basis yang tidak diunggulkan dan tidak prospek untuk dikembangkan justru dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dari sektor basis seperti industri pengolahan dan pertambangan. Hal ini bisa terjadi karena sektor pertanian, perdagangan, jasa pendidikan dan penyediaan akomodasi berperan beasr terhadap pertumbuhan ekonomi di Riau selama kurun waktu 2017-2020 sehingga pertumbuhan ekonomi per sektor lapangan usaha ini lebih cepat dibandingkan dengan sektor lainnya.

Jika dihubungkan antara jumlah penyerapan tenaga kerja per sektor lapangan usaha terhadap PDRB di Riau selama 4 tahun terlihat bahwa tahun 2017- 2010 nilai koefisien korelasinya -0,383 tahun 2017 dan -0,393 tahun 2018, serta -0,40 tahun 2019 dan -0,381 tahun 2020 artinya bahwa tidak ada hubungan antara jumlah PDRB per sektor lapangan usaha , baik yang tergolong dalam sektor basis dan non basis terhadap penyerapan tenaga kerja di Riau.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya peran sektor lapangan usaha terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah belum tentu menunjukkan sektor tersebut mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dan sektor basis yang seharusnya prospek untuk dikembangkan sehingga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak ternyata dari hasi penelitian ini bertolak belakang dan ini diperkuat dengan nilai koefisien korelasi yang menunjukkan nilai negative untuk sektor basis yang memiliki peran terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tersebut.

Tabel 7: Koefisien Korelasi Jumlah PenyerapanTenaga Kerja Per Sektor Lapangan Kerja Terhadap PDRB Di Provinsi Riau Tahun 2017-2020

Tahun	Koefisien Korelasi Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Per Sektor Lapangan Kerja Terhadap PDRB di Riau
2017	-0,383
2018	-0,393
2019	-0,40
2020	-0,381

Sumber : Diolah Penulis

Selama tahun 2017-2020 persentase tenaga kerja formal di Riau tahun 2017 berjumlah 17,30% turun menjadi 45,05% tahun 2018, dan meningkat di tahun 2019 menjadi 47,78% dan turun kembali di tahun 2020 menjadi 44, 03%. Kecendrungan turunnya persentase penduduk yang bekerja di sektor formal menunjukkan bawah semakin banyaknya jumlah pencari kerja untuk dapat masuk kepasar kerja. Tahun 2020 jumlah tenaga kerja terdidik yang bekerja pada sektor pertanian berjumlah 1.184.203 orang dengan latar belakang pendidikan yang ditamatkan berasal dari penduduk yang belum /tidak bersekolah yang berjumlah 622.779 orang dan pendidikan SMP berjumlah 268.747 orang, sedangkan untuk tingkat pendidikan diploma dan universitas berjumlah 8.609 orang dan 21.430 orang. Tahun 2020 juga didominasi pada sektor perdagangan besar dan eceran , sektor industri pengolahan. Untuk tahun 2019 jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sketor pertanian berjumlah 1.134.823 orang berasal dari tingkat pendidikan tidak/belum sekolah, SMP dan SMA sedangkan untuk tingkat universitas hanya mendominasi 17.034 orang.

Untuk tahun 2018 sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahanmasih menjadi sektor yang dipilih oleh tenaga kerja untuk bekerja yaitu 1.140.824 orang untuk sektor pertanian yang didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang tidak/belum sekolah, SMP dan SMA. Tahun 2017 masih sektor pertanian, pedagangan dan industri pengolahan yang menjadi sektor utama untuk tenaga kerja bekerja dengan tingkat pendidikan tidak.belum sekolah, SMP dan SMA yang mendominasi untuk sektor pertanian. Untuk lulusan universitas dan diploma pada 3 sektor ini jumlah tenaga kerjanya sangat sedikit jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya.

Rata-rata status pekerjaan yang mendominasi adalah buruh/karyawan dari tingkat pendidikan tidak.belum sekolah, SMP dan SMA/SMK serta universitas mulai dari tahun 2017-2020. Di tahun 2019 tenaga kerja dengan tingkat pendidikan universitas/sarjana cukup besar mendominasi pada status pekerjaan buruh/karyawan, namun di tahun- tahun berikutnya lulusan perguruan tinggi tidak begitu mendominasi untuk jenis pekerjaan buruh/karyawan.

Jika dianalisis secara kualitatif tenaga kerja terdidik yang banyak bekerja justru didominasi oleh tenaga kerja yang tidak/belum sekolah, hal ini tentu sangat membuat kita miris sekali karena yang dibutuhkan pasar kerja adalah tenga kerja yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan memiliki pengalaman kerja dan keahlian yang di butuhkan oleh perusahaan tersebut. Jadi sangatlah wajar jika tingkat pengangguran untuk tingkat pendidikan universitas, diploma menjadi tinggi. Tingginya tingkat pengangguran terididik di stuatu wilayah tentu akan berdampak terhdap wilayah tersebut, hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Ikawati, 2019) dimana dampak dari segi fisik yang ditimbulkan adalah waktu menunggu terasa lebih lama, situasi yang sangat membosankan, tidak memiliki penghasilan yang tetap, karena kondisi demikian bisa berdampak turunnya imunitas tubuh sehingga sering mengalami sakit. Dari Segi psikis adanya perasaan malu karena tidak kunjung memperoleh pekerjaan, merasa diri tidak berguna sehingga harus menanggung beban moral lainnya, muncul rasa tidak percaya diri. Dari segi sosial banyak waktu yang terbuang percuma untuk kegiatan-kegiatan yang tidak jelas seperti menonton televisi, bergaul dengan lingkungan yang tidak jelas. Jadi jika hal ini dibiarkan tentunya generasi muda yang diharapkan dapat membangun daerah tersebut akan tidak terlihat perannya yang berdampak terhadap lambatnya pembangunan dan petubuhan ekonomi wilayah tersebut.

Untuk mensiasati terjadinya lonjakan tingkat pengguran terdidik maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi Riau dan institusi pendidikan yaitu:

1. Melakukan sinergitas antara institusi pendidikan dengan perusahaan-perusahaan sebagai demand tenaga kerja
2. Melakukan revisi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
3. Agar lulusan yang dihasilkan maka kurikulum yang di ajarkan kepada siswa/mahasiswa hendak lebih bersifat aplikatif sehingga saat para lulusan tersebut menyelesaikan pendidikannya mereka dapt langsung menerapakan ilmu yang mereka peroleh
4. Diperlukan pemagangan bagi siwa SMA/SMK atau mahasiswa Perguruan tinggi agar mereka mengetahui cara kerja disebuah perusahaan dan memilih tempat magang yang sesusai dengan dispilin ilmu mereka
5. Menjadikan lulusan tersebut sebagai Cerative Job bukan sebagai Job Seeker hal ini dilakukan agar terciptanya lapangan kerja baru
6. Mendidik siswa/mahasiswa dengan membangun incubator bisnis di institusi pendidikan mereka.
7. Keberfihakan dari para pengambil keputusan untuk dapat mempermudah birokrasi dan memberikan bimbingan kepada wirausaha muda untuk bisa menciptakan dan mengembangkan lapangan perkerjaan yang mereka ciptakan untuk membantu pemerintah mengatasi masalah pengangguran.

KESIMPULAN

Jumlah pengangguran terdidik selama kurun waktu 2017-2020 menunjukkan peningkatan terutama untuk tingkat pendidikan SMK sebesar 8,49%, untuk pendidikan SMA sebesar 6,77%, Diploma sebesar 6,7% dan Perguruan Tinggi berjumla 5,73% sedangkan untuk tingkat pendidikan SMP dan SD berjumlah 5,02% dan 2,64%. Hal ini tentu sangat

memprihatinkan sekali mengingat pendidikan dianggap mampu mengubah kualitas SDM masyarakat yang ditunjukkan dengan semakin meingkatnya taraf hidup masayarkat karena memiliki pekerjaan.

Sektor yang prospek untuk dikembangkan berdasarkan hasil perhitungan Location Quotient (LQ) > 1 bermakna bahwa selama tahun 2017-2020 sektor yang sangat prospek untuk bisa dikembangkan di Propinsi Riau yaitu pertanian, pertambangan dan industri pengolahan. Untuk tahun 2018 ada sedikit pengecualian bahwa sektor dimana nilai Location Quotient (LQ) > 1 pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial merupakan sektor basis sehingga sektor ini dapat dikembangkan tetapi di tahun 2017 dan 2019-2020 sektor ini tidak menjadi sektor basis karena PDRB pada sektor ini cenderung menunjukkan penurunan, hal ini disebabkan pemerintah daerah belum memfokuskan pengembangan pada sektor ini.

Peran sektor yang merupakan sektor basis terhadap pertumbuhan ekonomi berdarkan hasil Shift Share (SS) menunjukkan bahwa sektor lapangan usaha yang tidak dapat bertumbuh cepat yaitu sektor pertambangan dan galian di tahun 2017-2020, untuk sektor pengadaan listrik dan gas di tahun 2017 namun di tahun 2018-2020 sektor ini dapat bertumbuh lebih cepat. tahun 2018-2019 sektor pengadaan air dan pengolahan sampah daur ulang tidak dapat bertumbuh dengan cepat tetapi di tahun 2017 dan tahun 2020 menunjukkan sektor ini dapat bertumbuh dengan cepat. Tahun 2020 untuk sektor konstruksi dan pengadaan hotel tidak dapat bertumbuh dengan cepat, begitu juga dengan sektor transposrtasi dan penyediaan akomodasi , makan dan minum di tahun 2019-2020 tidak mampu tumbuh lebih cepat. untuk sektor jasa keuangan dan asuransi di tahun 2019 tidak dapat bertumbuh dengan cepat. Untuk sektor administrasi pemerintahan, pertahan dan jaminan sosial selama 4 tahun itu tidak mampu bertumbuh dengan cepat. Sektor jasa lainnya hanya di tahun 2020 tidak mampu bertumbuh.

Dari 17 sektor lapangan usaha menunjukkan 7 sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan ekonomi negative untuk beberapa tahuan sedangkan 10 sektor lainnya menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan ekonomi di Riau tahun 2017 tertinggi berada pada sektor jasa lainnya, lalu sektor jasa perusahaan. Untuk tahun 2018 pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yaitu 95,31%, tahun 2019 pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 9,17% dan di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 81,35%.

Sektor yang tergolong dalam sektor basis dalam penelitian ini yaitu sektor pertanian, pertambangan dan industri pengolahan tidak memiliki korelasi terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja di Propinsi Riau. Ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi nol artinya tidak ada hubungan antara jumlah PDRB di Riau terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap per sektor lapangan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, A. (2016). Analisis penyebab tingginya pengangguran sarjana di kecamatan simeulue barat kabupaten simeulue. 1–40.

Adi, L. (2017). Analisis Lq , Shift Share , Dan Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur 2017. JURNAL AKUNTANSI & EKONOMI FE. UN PGRI Kediri, 2(1), 79–90.

Arrozi, F., & Sutrisna, K. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lama Mencari Kerja Bagi Tenaga Kerja Terdidik Di Kota Denpasar. E-Jurnal EP Unud, 7(12), 2733.

Assaad, R., Krafft, C., & Yassin, S. (2020). Job creation or labor absorption? An analysis of private sector job growth in Egypt. Middle East Development Journal, 12(2), 177–207. https://doi.org/10.1080/17938120.2020.1753978

Blanchard, Olivier et al. 2013 edisi keenam, Makroekonomi. Jakarta : Penerbit Erlangga

Bloom, D. E., & Freeman, R. (1986). Population Growth, Labor Supply, and Employment in Developing Countries. National Bureau of Economic Research Working Paper Series, No. 1837. http://www.nber.org/papers/w1837%5Cnhttp://www.nber.org/papers/w1837.pdf

Gao, H., & Pan, D. (1996). Manpower Availability Prediction and the Optimal Control of Manpower System in Some Region. IFAC Proceedings Volumes, 29(1), 5682–5686. https://doi.org/10.1016/s1474-6670(17)58588-2

Hasibuan. 2002. Perencanaan Tenaga Kerja. Jakarta. FE Universitas Indonesia

Ikawati. (2019). Dampak Pengangguran Terdidik Ditinjau Dari Segi Fisik, Psikis, Sosial dan Solusinya. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, 43(1), 1–10.

Kuncoro,Mudrajad/ 2015. Indikator Ekonomi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Maryanti, S. (2012). Analisis Perencanaan Tenaga Kerja Terhadap Kebutuhan Tenaga Kerja Di Provinsi Riau Tahun 2006-2010. Pekbis Jurnal, 4(1), 54–62.

Maryanti, S. (2015). Analisis Sektor Unggulan Terhadap Kinerja Ekonomi Dalam Menyerap Tenaga Kerja Di Kota Pekanbaru. Pekbis Jurnal.

Maryanti, S. (2016). Analisis indeks pembangunan ketenagakerjaan di provinsi riau. Pekbis Jurnal, vol.8 no 2(pembangunan ketenagakerjaan), 83–96. https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JPEB/article/view/3625/3526

Maryati, S. (2015). Dinamika Pengangguran Terdidik: Tantangan Menuju Bonus Demografi Di Indonesia. Economica, 3(2), 124–136. https://doi.org/10.22202/economica.2015.v3.i2.249

Muhson, A., Wahyuni, D., & Mulyani, E. (2012). Analisis Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi Dengan Dunia Kerja. Jurnal Economia (Yogyakarta), 8(1), 42–52. https://doi.org/10.21831/economia.v8i1.800

Nugroho, (Fakultas Ekonomika dan Bisnis undip). (2014). Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nugroho SBM Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip. Media Ekonomi Dan Manajemen, 29(2), 195–202.

Pramusinto, N. D., & Mulyaningsih, T. (2019). Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja serta Pengangguran di Indonesia. Seminar Bisnis Magister Manajemen “Membangun Ekonomi Kreatif Yang Berdaya Saing,” 233–243. https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/11089/18. Novia dam Akhmad_.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sarjana, P. S., Statistika, D., Matematika, F., Ilmu, D. A. N., & Alam, P. (2017). Pemodelan tingkat pengangguran terdidik di indonesia menggunakan pendekatan regresi nonparametrik spline.

Setiawan, D., Prihanto, P. H., & Mustika, C. (2018). Analisis hubungan sektor ekonomi basis dengan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Merangin. E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan, 7(1), 23–32. https://online-journal.unja.ac.id/JSEL/article/view/4784

Simanjuntak, Payawaman,J. 2001. Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI

Suaidah, I., & Cahyono, H. (2013). Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jombang. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE), 1(3), 1–17. http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/3739

Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi. Padang: Baduose Media.

Sukirno, Sadono .2012. Pengantar Teori Ekonomi Makro. Jakarta : PT Grafindo Persada.

Sumarsono Sony. 2009. Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu

Tarigan, Robinson. 2003. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi (edisi revisi). Jakarta: Bumi Aksara.